



Pemenuhan Hak Anak Dan Keluarga Pada Kasus Korban Penyebaran Pornografi Di Dinas PPA Kota Medan

Destin Aulia Alma

Universitas Sumatera Utara

destinaulia922@gmail.com

Tuti Atika

Universitas Sumatera Utara

tuti.atika@usu.ac.id

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Jl. Dr. A. Sofian No.1A, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Indonesia

Korespondensi penulis : destinaulia922@gmail.com.

Abstract. *This journal explores the fulfillment of children's and family rights in the context of handling cases of victims of pornography dissemination at the Department of Women and Child Protection (Dinas PPA) in Medan City. The evaluation is conducted through final mediation to understand the progress experienced by clients in dealing with their cases. The mediation results indicate that the case is in the final trial stage, with positive information that the victim, who is a minor, has returned to school. However, the psychological impact on the victim remains a concern. The processes and assistance provided by the Dinas PPA demonstrate a positive impact at the micro level, aiding individuals directly, as well as at the macro level by contributing to improved public policies related to child and women protection. This journal illustrates the crucial role of the Dinas PPA in creating a safer and more responsive environment for human rights.*

Keywords: *Child Rights, Dinas PPA, Social Worker*

Abstrak. Jurnal ini mengulas pemenuhan hak anak dan keluarga dalam konteks penanganan kasus korban penyebaran pornografi di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinas PPA) Kota Medan. Evaluasi dilakukan melalui mediasi akhir untuk memahami kemajuan yang dialami oleh klien dalam menghadapi kasusnya. Hasil mediasi mengindikasikan bahwa kasus sedang dalam tahap persidangan akhir, dengan informasi positif bahwa korban, yang merupakan seorang anak di bawah umur, telah kembali bersekolah. Meskipun demikian, dampak psikologis terhadap korban tetap menjadi perhatian. Proses dan bantuan yang diberikan oleh Dinas PPA menunjukkan dampak positif pada tingkat mikro, membantu individu secara langsung, serta pada tingkat makro dengan memberikan kontribusi terhadap kebijakan publik yang lebih baik terkait perlindungan anak dan perempuan. Jurnal ini menggambarkan peran penting Dinas PPA dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap hak-hak asasi manusia.

Kata Kunci : Hak Anak, Dinas PPA, Pekerja Sosial

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin maju, penyebaran konten pornografi telah menjadi isu serius, khususnya terkait dampak negatifnya pada anak-anak. Fenomena ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk merumuskan kebijakan yang dapat melindungi generasi muda dari eksposur yang tidak sesuai dengan usia mereka. Sebagai respons terhadap tantangan ini, Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 hadir sebagai landasan hukum yang mengatur pornografi anak dalam ruang siber. Undang-Undang tersebut menetapkan fokus pada pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, serta penggunaan pornografi dalam dunia maya. Lebih dari sekadar melarang, undang-undang ini juga menekankan perlindungan anak dari pengaruh negatif pornografi. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan online yang aman dan mendukung perkembangan sehat anak-anak di tengah kemajuan teknologi.

Selain aspek regulasi hukum, upaya pencegahan penyebaran pornografi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Peran masyarakat menjadi integral dalam menjaga keamanan anak-anak di dunia digital. Kesadaran akan potensi bahaya, pembelajaran mengenai penggunaan yang aman dan bijak teknologi, serta laporan atas konten yang merugikan adalah beberapa cara di mana masyarakat dapat berkontribusi untuk melindungi generasi muda. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 membawa dampak positif dalam melindungi hak-hak anak di dunia maya. Peningkatan kesadaran hukum di kalangan pengguna internet, serta upaya pencegahan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, menjadi indikasi bahwa peraturan ini bukan hanya sekadar dokumen hukum, tetapi juga instrumen yang berdaya guna dalam melindungi generasi penerus bangsa. Meskipun telah ada langkah-langkah untuk mengatasi penyebaran pornografi anak dalam ruang siber, tantangan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Masa depan membutuhkan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat dalam mengidentifikasi solusi inovatif yang dapat menjaga anak-anak dari dampak negatif konten yang tidak sesuai.

Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2MKB) di Jalan A. H. Nasution No. 17, Medan, memiliki peran sentral dalam menjaga hak anak dan perempuan di Kota Medan. Sebagai lembaga pemerintah yang fokus pada perlindungan dan kesejahteraan keluarga, DP3AP2MKB berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam menangani isu-isu sensitif seperti penyebaran pornografi, khususnya yang melibatkan anak-anak. Dengan jam operasional yang luas, yakni Senin-Kamis 08.00-16.30 WIB, dan Jumat 08.00-17.00 WIB, DP3AP2MKB memberikan sinyal kuat bahwa mereka siap memberikan pelayanan secara inklusif kepada masyarakat. Ketersediaan lembaga ini selama jam kerja yang panjang memberikan kesempatan bagi individu untuk mendapatkan bantuan, informasi, dan perlindungan tanpa terkendala waktu. Misi utama DP3AP2MKB adalah memberikan perlindungan kepada anak-anak dan perempuan dari segala bentuk ancaman, termasuk penyebaran konten pornografi.

Dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, lembaga ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka yang membutuhkan perlindungan khusus. DP3AP2MKB bukan hanya menjadi penyedia perlindungan fisik, tetapi juga sumber informasi yang berharga bagi masyarakat. Mereka tidak hanya memberikan edukasi tentang dampak dan cara pencegahan penyebaran pornografi kepada individu, tetapi juga secara aktif terlibat dalam mengoordinasikan upaya dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, untuk mencegah dan menangani kasus-kasus yang muncul. DP3AP2MKB dengan jelas menunjukkan komitmennya dalam pencegahan penyebaran pornografi dengan melibatkan masyarakat. Dengan menciptakan program-program edukasi, kampanye pencegahan, dan kerja sama dengan lembaga lain, mereka berusaha secara aktif untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dan memastikan hak anak dan perempuan tetap terlindungi di tengah arus informasi digital yang semakin kompleks.

Adanya isu penyebaran pornografi di Kota Medan menjadi panggilan mendesak untuk lebih memahami dampaknya, khususnya terhadap hak anak. Fenomena ini tidak hanya mengancam integritas fisik dan mental anak-anak, tetapi juga menghancurkan hak-hak dasar mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Penelitian menjadi instrumen yang krusial dalam menghadapi tantangan ini. Pentingnya penelitian terletak pada kemampuannya untuk membongkar lapisan-lapisan kompleks dampak penyebaran pornografi pada hak anak di Kota Medan. Dengan pengetahuan yang diperoleh, masyarakat dan lembaga terkait dapat mengambil langkah-langkah konkrit untuk melibatkan solusi yang efektif. Penelitian ini membawa fokus pada pemenuhan hak anak yang menjadi korban penyebaran pornografi. Dengan menggali lebih dalam, diharapkan dapat teridentifikasi sejauh mana hak-hak mereka terpenuhi atau terabaikan. Ini menjadi dasar untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih terarah dalam melindungi hak-hak anak secara spesifik. Evaluasi terhadap efektivitas upaya yang telah dilakukan oleh lembaga seperti DP3AP2MKB menjadi langkah penting dalam penelitian ini. Melalui pemahaman lebih mendalam terkait kontribusi lembaga-lembaga perlindungan, kita dapat mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan peluang yang dapat diperbaiki guna memastikan perlindungan hak anak di Kota Medan menjadi lebih optimal.

Penelitian ini bukan hanya berorientasi pada analisis masalah, tetapi juga pada pencarian solusi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terkait dampak penyebaran pornografi, harapan kita adalah munculnya langkah-langkah lebih efektif dan inovatif dalam melibatkan masyarakat dan lembaga pemerintah seperti DP3AP2MKB untuk melindungi hak anak di Kota Medan. Dengan demikian, kita dapat membangun lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi generasi mendatang.

STUDI LITERATUR

a. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Fethisism Dalam Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) Studi pada Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Medan (Ade Anugrah : Universitas Medan Area 2023)

Jurnal ini membahas perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual fethisism dalam konteks Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS), dengan fokus studi pada Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Medan. Penelitian ini menyoroti perlunya perhatian terhadap aspek-aspek hukum yang melibatkan korban pelecehan seksual dengan latar belakang fethisism di ranah siber. Jurnal ini mencermati dampak KGBS dan upaya hukum yang dapat diambil untuk melindungi korban. Selain itu, jurnal ini mengeksplorasi praktik hukum yang telah dilakukan oleh Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Medan dalam menangani kasus KGBS. Analisis menyeluruh terhadap peran lembaga ini membuka pemahaman terkait keberhasilan, hambatan, dan solusi yang dapat diimplementasikan. Jurnal ini juga memberikan gambaran tentang kondisi perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual fethisism di era digital. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang perlindungan hukum dalam konteks KGBS dan menunjukkan relevansinya dalam meningkatkan pemahaman dan tindakan terkait dengan perlindungan korban pelecehan seksual. Jurnal ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, kebijakan, dan advokasi hak asasi manusia, terutama terkait dengan fenomena pelecehan seksual di dunia maya.

b. Pemenuhan Hak Hak Anak pada Masa Pandemi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Rhiska Afrilliani : Universitas Mulawarman 2021)

Jurnal "Pemenuhan Hak Anak pada Masa Pandemi di Kabupaten Kutai Kartanegara" membahas dengan mendalam tantangan dan langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi selama masa pandemi. Penelitian ini menyoroti dampak pandemi terhadap aspek-aspek penting dalam kehidupan anak-anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan psikososial. Dalam menghadapi pandemi, jurnal tersebut memberikan penekanan khusus pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini mencakup kebijakan dan program perlindungan anak yang dirancang untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi anak-anak selama krisis kesehatan ini. Adanya inisiatif konkret ini mencerminkan komitmen untuk menjaga pemenuhan hak anak sebagai prioritas utama dalam situasi darurat.

Jurnal ini juga menyoroti peran masyarakat dalam mendukung anak-anak selama pandemi. Inisiatif lokal dan kepedulian masyarakat tercermin dalam upaya bersama untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial. Kerjasama antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di Kabupaten Kutai Kartanegara selama masa pandemi. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kompleksitas tantangan dan upaya konkret yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak di tengah kondisi darurat pandemi. Pemahaman ini penting untuk membimbing perencanaan kebijakan dan tindakan lebih lanjut guna menjaga kesejahteraan anak-anak di masa krisis.

c. PERAN DP3A DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Serta Penerapannya di Banda Aceh) (Teuku Naufal Harist : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2022)

Jurnal ini secara khusus mengangkat peran Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan (DP3A) dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi di Banda Aceh. Dalam analisisnya, jurnal mencermati dengan seksama kerangka hukum positif yang telah dibangun, menyoroti bagaimana DP3A berperan sebagai garda terdepan dalam menangani kasus eksploitasi anak. Upaya DP3A dalam merinci dan mengimplementasikan regulasi hukum positif menjadi poin penting yang disoroti, memperlihatkan kontribusi nyata lembaga ini dalam menjaga hak dan keamanan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi di wilayah tersebut. Jurnal ini juga menggali dimensi hukum Islam sebagai tambahan perspektif dalam perlindungan anak. Analisis hukum Islam tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga menonjolkan bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam diintegrasikan dalam upaya perlindungan anak. Dengan merinci penerapan hukum Islam dalam konteks perlindungan anak dari eksploitasi, jurnal memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana dua kerangka hukum, yaitu hukum positif dan hukum Islam, dapat saling melengkapi untuk menciptakan perlindungan yang holistik bagi anak-anak di Banda Aceh. Kesimpulan dari jurnal ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam terkait peran DP3A dan keterkaitannya dengan hukum positif dan hukum Islam dalam perlindungan anak. Informasi yang diberikan oleh jurnal ini tidak hanya memberikan wawasan hukum, tetapi juga relevan bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan pihak-pihak yang berkontribusi dalam melindungi hak anak di Banda Aceh. Dengan demikian, jurnal ini menjadi sumber pengetahuan yang berharga dan aplikatif dalam konteks perlindungan anak di wilayah tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan obyek ataupun fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain (keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan), yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam kegiatan penelitian ini peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya.

Penelitian ini dilakukan di UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di l. Jenderal Besar A.H. Nasution No.112, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20142 yang menjadi bagian dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2MKB) kota medan.

PEMBAHASAN

Dinas PPA Kota Medan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan memberdayakan anak-anak agar dapat pulih secara fisik, mental, dan emosional. Langkah-langkah ini mencakup pemberian bantuan psikososial, pendampingan hukum, serta upaya untuk memastikan akses anak-anak terhadap pendidikan dan lingkungan yang bebas dari eksploitasi. Melalui pemenuhan hak anak ini, Dinas PPA berkomitmen untuk mengembalikan martabat dan kesejahteraan anak-anak yang terdampak, sambil secara proaktif mencegah penyebaran pornografi anak di wilayah Kota Medan. Melaksanakan pemenuhan hak anak korban penyebaran pornografi di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinas PPA) Kota Medan memiliki manfaat yang sangat signifikan. Tindakan ini tidak hanya memberikan perlindungan fisik dan psikologis bagi anak-anak yang menjadi korban, tetapi juga memastikan pemulihan dan reintegrasi mereka ke

dalam masyarakat. Dengan memberikan akses terhadap layanan kesehatan mental, dukungan psikososial, dan pendampingan hukum, Dinas PPA berperan dalam mengembalikan hak-hak dasar anak yang mungkin terabaikan akibat pengalaman traumatis.

Pada kegiatan ini diharapkan mahasiswa mengimplementasikan metode groupwork dalam menyelesaikan masalah klien. Karena dalam membantu klien untuk suatu permasalahan akan secara langsung tidak hanya individu tetapi juga ke kelompok. Metode pekerjaan sosial yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dimiliki klien adalah sebagai berikut :

1. Engagement, Intake, Contract

Metode ini merupakan awal kegiatan pembuatan kontrak yang dilakukan antara pekerja sosial dengan klien. Pada tahap ini dilakukan dengan memastikan terlebih dahulu apakah klien ingin menyelesaikan masalahnya bersama dengan pekerja sosial atau tidak. Dan juga mencoba untuk menjelaskan kepada klien apa itu pekerja sosial dan apa yang menjadi tujuan pekerja sosial. juga menanyakan mengenai ketersediaan klien mengenai bantuan yang akan diberikan dalam menyelesaikan masalahnya dengan perjanjian berapa lama proses akan dilakukan seperti pada Gambar 1. Pada tahap ini, dilakukan pendekatan kepada klien dengan menghilangkan jarak dan formalitas pada klien. Pekerja sosial juga menggali informasi dengan cara persuasif dan tidak menghakimi sehingga klien mau terbuka. Kemudian dijelaskan profesi pekerja sosial yang bersedia membantu mereka, dan membuat kesepakatan kontrak.

Kegiatan PKL 2 dilakukan selama satu semester di UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di l. Jenderal Besar A.H. Nasution No.112, Kwa Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Kegiatan dimulai dengan mengurus kebutuhan administrasi perizinan ke Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan yang terletak di jalan Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Medan. Setelah berkas tersebut rilis, pekerja sosial langsung memberikan surat izin tersebut ke Dinas PPA untuk di asesmen lebih lanjut hingga akhirnya diperbolehkan untuk melakukan praktikum di tempat tersebut.

2. Assessment

Tahap ini adalah tahap awal dari proses pemecahan masalah klien dengan pengenalan dan mengetahui permasalahan dari hasil observasi juga pengkajian masalah pada klien, dan dari hasil menunjukan bahwasanya klien memiliki permasalahan. Untuk tools yang digunakan menggunakan tools Focus Group Discussion (FGD) dengan pendekatan Non-direktif. Di mana pekerja sosial memberikan beberapa pertanyaan dan menanyakan informasi untuk membuka diskusi yang dimulai dengan topik-topik sederhana kemudian masuk ke dalam pembahasan inti yaitu masalah apa yang dialami oleh klien. Setelah melakukan tahap assesment teridentifikasinya permasalahan yang dialami.

Gambar 1



Proses Asesmen yang dilakukan disini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan pada klien, yakni keluarga yang anaknya (anak dibawah umur) mengalami korban pelecehan penyebaran pornografi. Setelah melakukan asesmen, didapat

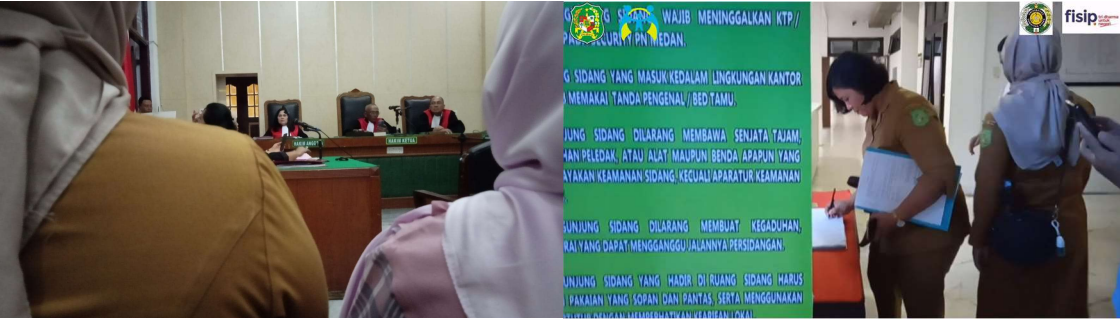
diagnosa bahwa korban dan keluarga terkena beberapa kerugian baik dari kerugian fisik, psikis, dan sosial akibat dari kasus ini. Dalam kasus ini, prioritas utama yang harus dilakukan adalah mengembalikan semangat hidup korban dikarenakan korban enggan untuk masuk sekolah dikarenakan trauma.

3. Perencanaan / Planning

Tahap ini merupakan tahapan yang berisikan tentang rencana strategi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah klien berdasarkan dari hasil assessment. klien disini perlu dilibatkan, karena setiap klien adalah unik (berbeda satu dengan yang lainnya). Dengan demikian, klien mempunyai peran yang sangat besar atas kesembuhannya sendiri. Pengidentifikasian masalah pada klien serta mencari cara paling cocok untuk menyelesaikan masalah yang klien hadapi, semua hal tersebut dilakukan pada tahap perencanaan. Setelah mendapat informasi yang cukup, pekerja sosial memutuskan untuk membuat langkah implementasi

Kegiatan dimulai pada tanggal 25 Oktober 2023 yakni melakukan pendampingan persidangan kasus korban dan pelaku di Pengadilan Negeri Medan di Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan. Persidangan terbagi menjadi dua yakni persidangan terbuka dan persidangan tertutup.

Gambar 2



Selanjutnya pada tanggal 10 November pihak pekerja sosial dan staf UPT Dinas PPA melakukan mediasi antara keluarga korban dan pihak sekolah korban, agar korban dapat bersekolah kembali dan memberikan informasi serta konteks kepada pihak guru dan staf sekolah mengenai kondisi korban yang sudah lama tidak bersekolah. Hasilnya didapat korban akhirnya mau kembali bersekolah dan pihak sekolah menerima korban dengan tangan terbuka.

Gambar 3



Pada tanggal 13 November korban dan keluarga melakukan sesi konseling dengan psikolog yang bernama Ibu Ika untuk mendiagnosis aspek-aspek psikis yang terdampak agar pemulihan keluarga dapat lebih terstruktur.

4. Evaluasi dan Terminasi

Dalam rangka hasil evaluasi, suatu mediasi akhir dilakukan untuk mendengarkan perkembangan yang dihadapi oleh klien sehubungan dengan masalah yang tengah dihadapi. Mediasi ini membuka ruang bagi pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan mencari solusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan klien. Hasil dari mediasi ini menggambarkan bahwa kasus yang sedang dihadapi oleh klien telah mencapai tahap persidangan tahap akhir, memberikan gambaran tentang progres hukum yang sedang berlangsung. Dalam penyampaian hasil mediasi, klien menyatakan bahwa situasi kasusnya saat ini telah mencapai tahap akhir persidangan. Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa proses hukum terkait penyebaran pornografi yang melibatkan klien telah mencapai tahap penentuan keputusan. Di samping itu, informasi positif juga mencuat bahwa korban, yang notabene merupakan seorang anak di bawah umur, telah mulai kembali bersekolah. Meskipun demikian, disebutkan bahwa korban masih mengalami sejumlah tingkat trauma terkait peristiwa yang dialaminya.

Meski telah mencapai tahap persidangan tahap akhir, penekanan pada dampak psikologis terhadap korban tetap menjadi sorotan. Pernyataan bahwa korban telah kembali bersekolah memberikan harapan positif terkait pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam lingkungan pendidikan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinas PPA) Kota Medan dalam memastikan pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pendidikan, dalam konteks penanganan kasus penyebaran pornografi.

Gambar 4



5. KESIMPULAN

Dari rangkaian proses penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, proses dan bantuan yang disediakan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinas PPA) memainkan peran krusial dalam memberikan manfaat baik dari segi mikro maupun makro. Dari perspektif mikro, bantuan yang diberikan oleh Dinas PPA dapat secara langsung memengaruhi kesejahteraan individu, seperti klien yang menjadi korban penyebaran pornografi. Melalui mediasi dan pendampingan, Dinas PPA membantu klien untuk mengatasi traumatisasi yang dialami, memberikan dukungan psikososial, dan memastikan bahwa hak-hak dasar mereka dipenuhi.

Dengan menyediakan akses terhadap bimbingan hukum, Dinas PPA juga memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan, memberikan perlindungan kepada korban, dan menghukum pelaku kejahatan.

Dari segi makro, keterlibatan Dinas PPA juga membawa manfaat signifikan untuk masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan. Melalui penanganan kasus-kasus individu, Dinas PPA memberikan kontribusi terhadap peningkatan keadilan sosial. Pemberdayaan korban dan pencegahan lebih lanjut terhadap kasus serupa juga menjadi fokus, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, langkah-langkah yang diambil oleh Dinas PPA membantu membentuk kebijakan publik yang lebih baik terkait perlindungan anak dan perempuan, memberikan kontribusi positif pada tingkat kota dan mungkin bahkan nasional. Dengan demikian, melalui intervensi dan bantuan ini, Dinas PPA memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil, aman, dan peduli terhadap hak-hak asasi manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak. Terimakasih diucapkan kepada pihak UPT Dinas PPA Kota Medan yakni Bapak Anas Ansor Siregar, Ibu Wasni Hutagaol, Ibu Natalie, Kak Apni, Kak Asri, dan Kak Agustina yang memberikan bantuan dan dukungan, juga kepada Bapak Fajar Utama Ritonga, S.Sos, M.Kes.Sos, selaku Dosen pengampu mata kuliah, Ibu Tuti Atika selaku Dosen Supervisor Lapangan yang telah membimbing dengan sangat baik dalam proses penulisan jurnal ini dan selama Kegiatan Praktikum Kerja Lapangan (PKL) ini.

REFERENSI

Ariyuna Zai, Taufik Siregar, “Dedy Irsan, Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias”, Jurnal Hukum, Vol.4, No.2 Tahun 2011.

Elanda, Jamal “Potret dan Eksternalitas Pengemis di Kota Banda Aceh”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, 2018, Universitas Syiah Kuala Aceh.

Hambali, “Hak Anak atas Pendidikan; Pemenuhan Hak dan solusinya (Dimulai dari Pendidikan Keluarga dan aktivitas Sederhana)”, Jurnal Paradigma, XII (24) Juli- Desember 2007, IKIP Budi Utomo Malang.

Munandar, "Kedudukan Anak sebagai Jinayah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah." Syiah Kuala Law Journal, vol. 1, no. 1, Apr. 2017. 57

Tarmizi, “Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Anak di Banda Aceh”, Jurnal Ilmiah Mondial, Ilmu-Ilmu Sosial dan Kemasyarakatan, 11 (19) Januari-Juni 2009, Universitas Syiah Kuala Aceh.

Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.54, Th. XIII Agustus, 2011.

Abdul Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional, Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, Jawa Tengah: AlAndalus, 2015.

Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.

Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.